



1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and other Matters 1972^{*)}

Latar Belakang

Pembuangan sampah yang ditempatkan di kapal khusus pembuangan sampah dan dibuang ke laut telah dilakukan selama bertahun-tahun oleh negara-negara industri. Untuk mencegah praktek-praktek polusi terhadap lingkungan laut tersebut maka diberlakukanlah Konvensi Oslo pada tahun 1974 dan Konvensi London tahun 1972 (*London Dumping Convention 1972*) pada tanggal 30 Agustus 1975.

Konvensi London 1972 yang diikuti oleh 80 negara peserta ini memiliki karakter global dan merupakan sumbangan tersendiri bagi pengontrolan dan pencegahan polusi terhadap lingkungan laut secara internasional. Karakter global yang melekat pada Konvensi London 1972 dikarenakan konvensi ini bertujuan untuk mengatur pembuangan sampah di laut dengan tetap berusaha melindungi laut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melarang pembuangan segala bahan-bahan berbahaya dan keharusan untuk mendapatkan izin khusus terlebih dahulu untuk pembuangan sampah.

Kedua konvensi tersebut kemudian diikuti oleh beberapa perjanjian serupa di tingkat regional yang dapat menghentikan praktek pembuangan limbah yang tidak diatur dalam konvensi. Sebagian besar dari ketentuan-ketentuan tersebut sama-sama menggunakan pendekatan yang disebut sebagai "*black & grey list approach*". Daftar hitam (*the black list*) berisikan daftar pembuangan limbah yang dilarang, sedangkan daftar abu-abu (*the grey list*) berisikan daftar materi-materi yang dapat dibuang di bawah pengawasan yang ketat yang harus memenuhi beberapa kondisi tertentu.

^{*)} http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?topic_id=258&doc_id=681#7

Di era 90-an mulai terjadi perkembangan yang cukup berarti bagi Konvensi London 1972 di mana pada tahun 1990, peserta dari Konvensi London setuju untuk menghentikan proses pembuangan sampah industri di laut secara bertahap yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 1996 (resolusi LDC.43(13)). Pada tahun 1991, negara-negara peserta juga setuju untuk menerapkan "*pre-cautionary approach*" dalam perlindungan lingkungan.

Proses titik balik benar-benar dimulai ketika pada tahun 1993 negara-negara peserta mulai melakukan *review* secara mendetail mengenai Konvensi London yang mengadopsi beberapa amandemen penting terhadap *Annexes* I dan II dari Konvensi London. Amandemen tersebut berisikan larangan pembuangan sampah radioaktif dan pembakaran sampah di laut, serta penghentian secara bertahap pembuangan sampah industri yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 1996. Pada tahun 1996 *review* tersebut telah dilengkapi dengan diadopsinya Protokol 1996 di mana pada saat mulai berlaku maka Protokol tersebut akan menggantikan Konvensi London 1972.

Prinsip Pokok

Protokol 1996 ini dibentuk karena dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk melindungi lingkungan laut dan mendorong penggunaan serta konservasi sumber-sumber kelautan secara berkelanjutan. Dalam pasal 2 Protokol ini dinyatakan bahwa tiap-tiap negara peserta baik secara individual maupun bersama-sama harus melindungi lingkungan laut dari segala sumber polusi dan juga mengambil langkah-langkah efektif berdasarkan kemampuan keilmuan, teknologi dan ekonomi masing-masing negara untuk mencegah, mengurangi dan apabila dimungkinkan menghilangkan polusi yang dihasilkan oleh pembuangan atau pembakaran sampah di laut. Semua langkah-langkah yang dilakukan dalam skala internasional tersebut harus dilakukan tanpa menunda pelaksanaan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dengan tujuan untuk mengatur aktivitas manusia agar ekosistem laut tetap dapat digunakan secara berkelanjutan serta tetap dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan akan datang.

Materi Pokok

Salah satu inovasi penting yang diperkenalkan dalam Protokol 1996 ini adalah apa yang disebut sebagai "*precautionary approach*" dan "*polluter-pays principle*" (pasal 3). Protokol ini

meminta negara-negara peserta untuk mengambil langkah-langkah pencegahan apabila terdapat alasan untuk percaya bahwa limbah atau bahan-bahan lain yang dilepaskan ke lingkungan laut akan mendatangkan bahaya terhadap lingkungan laut walaupun tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan hubungan sebab-akibat antara pemasukan limbah tersebut dan efek yang dihasilkannya. Dalam pasal 3 tersebut juga diatur mengenai kewajiban *polluter* (pihak yang menyebabkan polusi) untuk membayar segala biaya yang diperlukan untuk menghilangkan polusi tersebut. Hal ini diatur lebih jelas di dalam pasal 15 yang mengatur mengenai tanggung jawab negara sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional terhadap segala kerusakan lingkungan negara lain dimana negara tersebut berkewajiban untuk mengganti segala kerusakan yang ditimbulkan dari pembuangan dan pembakaran limbah di laut yang dilakukannya.

Protokol 1996 ini bersifat lebih membatasi dibandingkan dengan Konvensi London 1972. Hal ini terbukti bahwa dalam Konvensi London 1972 terdapat ketentuan yang mengizinkan pembuangan limbah di bawah pengawasan yang ketat selama dapat memenuhi beberapa kondisi tertentu yang disebut sebagai "*black & grey list approach*". Dalam Protokol 1996, tiap-tiap negara peserta diharuskan melarang pembuangan segala limbah dengan pengecualian yang diatur dalam *annex 1* yang juga diharuskan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu. Kebolehan untuk membuang limbah yang dikecualikan dalam *annex 1*, tidak dapat mencegah negara peserta untuk melarang pembuangan limbah tersebut termasuk yang diatur di dalam *annex 1* sepanjang negara peserta tersebut memberitahu IMO mengenai langkah-langkah yang dilakukannya (pasal 4). Satu-satunya pengecualian mengenai kebolehan membuang limbah diatur dalam pasal 8, yaitu dalam hal *force majeure* yang disebabkan oleh keadaan bahaya dalam hal cuaca atau apabila terdapat keadaan yang menimbulkan bahaya bagi keselamatan hidup, terdapat ancaman yang nyata terhadap kapal, pesawat, anjungan dan juga segala bangunan ciptaan manusia di laut. Apabila pembuangan atau pembakaran limbah di laut merupakan satu-satunya cara untuk mencegah ancaman tersebut maka pembuangan atau pembakaran limbah harus dilakukan tanpa menimbulkan kerusakan yang berlebihan terhadap lingkungan laut dimana langkah yang diambil ini pun harus dilaporkan kepada IMO.

Pembatasan lain adalah mengenai pembakaran limbah di laut yang sebelumnya diizinkan oleh Konvensi London 1972 namun dilarang secara tegas oleh Protokol 1996 dalam pasal 5 serta adanya larangan bagi negara peserta untuk mengizinkan ekspor limbah ke negara lain baik untuk pembuangan ataupun pembakaran di laut (pasal 6). Pencantuman pelarangan tersebut dalam Protokol 1996 dilatarbelakangi oleh adanya praktek pengeksporan limbah yang tidak bisa dibuang ke laut ke negara-negara bukan peserta berdasarkan Konvensi London 1972.

Dalam pasal 9 Protokol ini, diatur mengenai kewajiban negara peserta menunjuk pihak berwenang untuk mengeluarkan izin sesuai dengan Protokol serta kewajiban negara peserta menerapkan segala prosedur dan mekanisme yang diperlukan dalam rangka membantu dan mendukung pelaksanaan Protokol (pasal 11). Dalam usaha memenuhi tujuan dari Protokol ini maka negara-negara peserta diharapkan saling bekerjasama baik berupa kerjasama regional maupun kerjasama internasional dengan organisasi internasional yang berkompeten (pasal 12 jo pasal 17). Kerjasama tersebut dapat berupa kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi baik berupa pelatihan, transfer teknologi maupun transfer informasi yang berkaitan dengan segala upaya untuk mencegah, mengurangi dan apabila dimungkinkan untuk menghilangkan segala polusi yang dihasilkan dari pembuangan limbah (pasal 13 jo pasal 14).

Keberlakuan Protokol ini diatur dalam pasal 25 yaitu mulai berlaku apabila telah terdapat 26 negara yang menyatakan diri terikat pada Protokol ini di mana di dalamnya harus terdapat setidaknya 15 negara peserta Konvensi London 1972. Pada saat ini Protokol 1996 belum berlaku karena belum memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 25, tetapi hingga saat ini sudah terdapat 10 negara peserta Konvensi London 1972 yang menjadi peserta dari Protokol 1996. (Dian Tri Irawaty)

Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria

(Cameroon v. Nigeria: Equitorial Guinea intervening)^{*)}

Para Pihak (Parties)

Penggugat : Kamerun
Tergugat : Nigeria

^{*)} <http://www.icj.org/file:///A:/CameroonVsNigeria-PreliminaryObjections.htm>

Panel : ICJ (International Court of Justice)
Intervensi : Guinea Khatulistiwa

Pokok Permasalahan (Issues)

Penetapan batas maritim negara Kamerun dan Nigeria di teluk Bakassi dan batas negara di Lake Chad dan antara Lake Chad dan laut.

Fakta-Fakta (Facts)

1. Pada tanggal 29 Maret 1994, ICJ memanggil Kamerun dan Nigeria mengenai permasalahan penguasaan Teluk Bakassi. Kamerun menyatakan dalam permohonannya bahwa "batas maritim antar kedua negara telah ditetapkan sebagian dan telah diusahakan untuk dilengkapi, tetapi kedua belah pihak tidak dapat melakukannya." Berdasarkan hal ini, ICJ menyatakan "Untuk menghindari kejadian bahaya antara kedua belah negara, ...Untuk menetapkan batas maritim antar kedua negara diluar daripada garis yang ditetapkan pada tahun 1975." Kedua pihak menerima yurisdiksi ICJ *art. 36, Para. 2 Statuta ICJ*¹.
2. Pada tanggal 6 Juni 1994, Kamerun mengisi pendaftaran tambahan permohonan 'Atas perluasan pokok perkara' menyatakan 'Penguasaan atas bagian wilayah Kamerun dalam wilayah Lake Chad.' Kamerun juga meminta ICJ untuk 'mendefinisikan secara spesifik' garis batas antara dua negara dari Lake Chad ke laut, dan meminta untuk mengikutsertakan dua permohonan dan untuk 'memeriksa semuanya dalam satu kasus.'
3. Dalam pertemuan antara *President of ICJ* dengan perwakilan dari para pihak pada tanggal 14 Juni 1994, Agen Nigeria menyatakan bahwa ia tidak memiliki penolakan terhadap permohonan tambahan Kamerun, sehingga ICJ

¹ ICJ Statute *art. 36 Para. 2*, "The States Parties to the presents statute may any time declare that they recognize as compulsory *ipso facto* and without special agreement, in relation to any other state accepting the same obligation, the jurisdiction of the Court in all legal disputes concerning:

- a. The interpretation of a treaty;
- b. Any question of international law;
- c. The existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligations;
- d. The nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation."

dapat menyetujui semua menjadi satu kasus. Sesuai *order* tanggal 16 Juni 1994, ICJ menyatakan tidak ada penolakan dalam prosedur dan, batas waktu yang ditetapkan dalam pengisian permohonan tertulis.

4. Kamerun mengisi Memorialnya. Dalam batas waktu yang ditetapkan untuk pengisian Counter-Memorial, Nigeria mengisi terlebih dahulu penolakan terhadap yurisdiksi ICJ dan penolakan penerimaan permohonan. Sesuai *order* tanggal 10 January 1996, *President of ICJ* menyatakan berdasarkan *art. 79 para. 3 Rules of ICJ*², proses tersebut patut ditunda. Kemudian ditetapkan tanggal 15 Mei 1996 sebagai batas waktu Kamerun untuk hadir dengan pernyataan tertulis atas tanggapan mengenai pendahuluan penolakan.
5. Kamerun memilih Keba Mbaye dan Nigeria memilih Bola Ajibola sebagai Hakim *ad hoc*.
6. ICJ, untuk menanggapi permintaan Kamerun dan untuk mendengar kedua belah pihak, mengeluarkan pendapat sementara dalam *order* tanggal 15 Maret 1996.
7. Dengar Pendapat (*hearings*) penolakan sementara diadakan pada tanggal antara 2 dan 11 Maret 1998.
8. Dalam Putusan 11 Juni 1998 atas penolakan sementara Nigeria, ICJ menyatakan bahwa ICJ memiliki yurisdiksi atas perkara dan permintaan Kamerun dapat diterima. ICJ menolak tujuh penolakan sementara Nigeria dan menyatakan yang kedelapan tidak memiliki karakter eksklusif³ sementara, sehingga dapat dinyatakan dalam putusan sementara.

² Rules of Court art.79 parag.3 "(3) Upon receipt by the registry of a preliminary objection, the proceedings on the merits shall be suspended and the court, or the presidents if the court is not sitting, shall fix the time-limit within which the other party may presents a written statement of its observations and submissions; documents in support shall be attached and evidence which it is proposed to procedure shall be mentioned."

³ Article 36 Statuta ICJ,

- (1) The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially provided for in the Charter of the United Nations or in treaties and conventions in force.
- (2) The states parties to the present Statute may at any time declare that they recognize as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any other state accepting the same obligation, the jurisdiction of the Court in all legal disputes concerning:
 - (a) the interpretation of a treaty;

9. Pada tanggal 28 Oktober 1998, Nigeria menyatakan permintaannya atas Putusan sementara 11 Juni 1998 mengenai penolakan sementara; menjadi kasus baru, terpisah dari proses yang ada. Sesuai Keputusan tanggal 25 Maret 1999, ICJ menyatakan Permintaan Nigeria tidak dapat diterima.
10. Counter-Memorial Nigeria, diisi dengan perpanjangan waktu hingga 31 Mei 1999, termasuk klaim-Counteranya.
11. Sesuai *order* 30 Juni 1999, ICJ menyatakan klaim-Counter Nigeria dapat diterima.
12. Pada tanggal 30 Juni 1999, Republik Guinea Khatulistiwa mengajukan permohonan ijin untuk mengintervensi dalam perkara sesuai *art.62 Statuta ICJ*⁴. Objek dari intervensi tersebut adalah "melindungi hak-hak hukum dari Republik Guinea Khatulistiwa di teluk Guinea dengan segala hukum yang dapat diterapkan" dan untuk "menginformasikan kepada ICJ mengenai sifat dasar hak-hak hukum dan kepentingan dari Guinea Khatulistiwa dapat terpengaruh dengan adanya Putusan ICJ dalam menetapkan klaim batas maritim oleh para pihak dihadapan ICJ." Guinea

-
- (b) any question of international law;
 - (c) the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation;
 - (d) the nature of extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation.
- (3) The declarations referred to above may be made unconditionally or on condition of reciprocity on the part of several or certain states, or for a certain time
 - (4) Such declarations shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the parties to the Statute and to the Registrar of the Court.
 - (5) Declarations made under Article 36 of the Statute of the Permanent Court of International Justice and which are still in force shall be deemed, as between the parties to the present Statute, to be acceptances of the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice for the period which they still have to run and in accordance with their terms.
 - (6) In the event of a dispute as to whether the Court has jurisdiction, the matter shall be settled by the decision of the Court.

⁴ ICJ Statute art.62, "(1) should a state consider that it has an interest of a legal nature, which may be affected by the decision in the case, it may submit a request to the court to be permitted to intervene. (2) It shall be for the court to decide upon this request."

- Khatulistiwa menyatakan lebih lanjut bahwa “tidak akan menjadi pihak dalam kasus.”
13. Dalam *order* 12 Oktober 1999, ICJ mempertimbangkan Pernyataan Guinea Khatulistiwa mengenai sifat dasar hukum yang dapat mempengaruhi putusan ICJ dalam menetapkan batas maritim antara Kamerun dan Nigeria, mengizinkan intervensi sesuai dengan cara dan berdasarkan tujuan pendaftaran dalam batas waktu mengenai proses intervensi (*art. 85 Rules of Court*⁵)
 14. Dengar pendapat publik (*Public Hearings*) diadakan tanggal 18 hingga 21 Maret 2002.

Dalil Para Pihak

A. Pemerintah Kamerun

“Sesuai *art. 60 para. 2* Peraturan Peradilan Republik Kamerun, dengan hormat meminta ICJ untuk memutuskan dan menetapkan:

(a) Bahwa batas negara Kamerun dan Nigeria adalah:

- Diukur dari titik koordinat 13°05' utara dan 14°05' timur, mengikuti garis lurus sejauh mulut Ebeji, di titik koordinat 12°32'17" utara dan 14°12'12" timur, yang didefinisikan dalam kerangka kerja LCBC dan ditetapkan dalam deklarasi Milner-Simon tanggal 10 Juli 1919 dan Deklarasi Thomson-Marchand tanggal 29 Desember 1929 dan 30 Januari 1930 seperti yang dikonfirmasi dalam 'Exchange of Letter' 9 Januari 1931; dengan alternatif, mulut Ebeji pada titik koordinat 12°31'12" utara dan 14°11'48" timur;
- Dari titik tersebut sesuai dengan yang ditetapkan oleh instrument yaitu sejauh 'puncak yang sangat menonjol' yang digambarkan dalam *para. 60* dari Deklarasi Thomson-Marchand yang disebut dengan 'Gunung Kombon';

⁵ Rules of Court art. 85, “(1) If an application for permission to intervene under article 62 of the statute is granted, the intervening State shall be supplied with copies of the pleadings and documents annexed and shall be entitled to submit a written statement within a time-limit to be fixed by the court. A further time limit shall be fixed within which the parties may. If they so desire, furnish their written observations on that statement prior to the oral proceedings. If the court is not sitting, these time limits shall be fixed by the president. (2) The time limits fixed according to the preceding paragraph shall, so far as possible, coincide with those already fixed for the pleadings in the case. (3) The intervening state shall be entitled, in the course of the oral proceedings, to submit its observations with respect to the subject-matter of the intervention.”

- Dari batas 'Gunung Kombon' menuju kepada 'Pillar 64' seperti disebut dalam *para.* 12 berdasarkan perjanjian Obokum (Anglo-German) 12 April 1913 yang diikuti pernyataan dalam bagian 6(1) dari British Nigeria (Daerah perlindungan dan kependudukan Kamerun) Sesuai dengan *order* dalam Dewan 2 Agustus 1946
 - Dari pillar 64 diikuti pernyataan *para.* 13 hingga 21 dari Perjanjian Obokum 12 April 1913 sejauh pillar 114 dari Cross River
 - Lalu, sejauh persimpangan garis lurus dari titik Bakassi ke titik King dipisahkan oleh selat Akwayafe yang dapat dilayari dan batas tersebut ditetapkan oleh *para.* XVI hingga XXI atau perjanjian Anglo-German 11 Maret 1913
- (b) Sebagai konsekuensinya (antara lain) kedaulatan atas teluk Bakassi dan atas wilayah yang dikuasai oleh Nigeria di sekitar danau Chad, terutama Darak dan sekitarnya adalah milik bangsa Kamerun.
- (c) Bahwa perbatasan wilayah maritim tersebut adalah milik Republik Kamerun maupun Republik Federal Nigeria antara lain berdasarkan:
- Dari persimpangan garis lurus dari titik Bakassi ke titik King dipisahkan oleh selat Akwayafe yang dapat dilayari sampai ke titik 12', bahwa perbatasan tersebut dinyatakan sebagai garis penyanggah *British Admiralty Chart* No. 3433 oleh Kepala Negara dari dua negara pada tanggal 14 April 1971 (Deklarasi Yaounde) dan dari titik 12' hingga titik G', oleh deklarasi yang ditandatangani di Maroua pada 1 Juni 1975
 - Dari titik G', garis persamaan yang diindikasikan oleh titik G, H (koordinat 8°21'16" timur dan 4°17' utara), I (7°55'40" timur dan 3°01'05" utara) dan dari K berlanjut sampai batas terluar dari zona maritim yang merupakan wilayah dibawah yurisdiksi masing-masing pihak sesuai hukum internasional.
- (d) Bahwa percobaan untuk mengubah secara paksa dan sepihak atas batasan yang didefinisikan dalam point (a) dan (c), Republik Federal Nigeria telah melanggar prinsip dasar mengenai prinsip dasar yang telah diwariskan sejak masa penjajahan (*utipossidetis juris*) seperti kewajiban hukum memperhatikan negara dan batas maritim.
- (e) Bahwa dengan menggunakan kekerasan melawan Republik Kamerun dan, khususnya, dengan penggunaan militer di

wilayah Kamerun dalam area danau Chad dan teluk Kamerun, di Bakassi, dan dengan membuat serangan sepanjang batasan antara kedua negara, Republik Federal Nigeria telah melakukan pelanggaran mengenai kewajiban berdasarkan perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional.

- (f) Bahwa Republik Federal Nigeria mempunyai kewajiban untuk mengakhiri kekuasaan administrasi dan militer di wilayah Kamerun dan, terutama secepatnya menarik pasukan dari wilayah danau Chad dan dari teluk Kamerun, di Bakassi dan tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang.
- (g) Bahwa dalam kegagalan untuk tunduk pada *order* atas provisional measures yang dikeluarkan oleh ICJ pada tanggal 15 Maret 1996 Republik Federal Nigeria telah melanggar kewajiban internasionalnya.
- (h) Bahwa hal-hal di atas merupakan pelanggaran internasional dan dideskripsikan secara detil dalam permohonan tertulis dan argumentasi lisan oleh Republik Kamerun mengakibatkan adanya pertanggungjawaban dari Republik Federal Nigeria.
- (i) Bahwa, sebagai konsekuensi, adanya kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh Republik Kamerun, ganti rugi dalam bentuk yang telah ditentukan ICJ merupakan suatu tindakan yang harusnya dilakukan oleh Republik Federal Nigeria kepada Republik Kamerun. Republik Kamerun lebih jauh meminta dengan hormat kepada ICJ mengijinkan untuk mengemukakan besarnya kompensasi (pengganti kerugian) terhadap perbaikan atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari pelanggaran internasional yang dilakukan oleh Republik Federal Nigeria.

Republik Kamerun juga meminta ICJ untuk menyatakan bahwa klaim-counter Republik Federal Nigeria tidak berdasar baik dalam fakta maupun hukum dan untuk menolaknya.

B. Pemerintah Nigeria

1. Meminta ICJ atas teluk Bakassi, memutuskan dan menyatakan:

- (a) Bahwa kedaulatan atas teluk tetap berada Republik Federal Nigeria
- (b) Bahwa Kedaulatan Nigeria atas Bakassi meluas hingga batas dengan Kamerun yang telah dijelaskan dalam Bab 11 Counter-Memorial Nigeria

2. Atas Lake Chad, memutuskan dan menyatakan:

- (a) Bahwa perbatasan dan garis demarkasi yang diajukan ke komisi Lembah Sungai Lake Chad, tidak diterima oleh Nigeria, dan tidak mengikatnya
 - (b) Bahwa kedaulatan atas wilayah danau Chad dinyatakan dalam *para. 5.9* dari balasan Nigeria dan tergambarkan dalam Figs. 5.2 dan 5.3 pada awal halaman 242 dan termasuk dalam wilayah Nigeria seperti yang terdapat dalam *para. 4.1* dari balasan Nigeria adalah mutlak milik Nigeria.
 - (c) Bahwa dalam berbagai kegiatan yang diadakan dalam kerangka kerja Komisi Lembah Sungai Lake Chad, dan yang dimaksudkan untuk menentukan secara keseluruhan perbatasan dan garis demarkasi di perbatasan danau Chad, adalah sah tanpa adanya sangkaan terhadap wilayah khusus danau Chad yang berada di wilayah Nigeria sebagai konsekuensi dari sejarah konsolidasi mengenai persetujuan surat bukti kepemilikan dari Kamerun.
3. Sepanjang mengenai garis pemisah perbatasan darat, memutuskan dan menyatakan:
- (a) Bahwa yurisdiksi ICJ diperluas sampai pada perbatasan darat yang pasti antara danau Chad dan laut.
 - (b) Bahwa muara Ebeji, menandai permulaan batas darat, yang terletak pada titik timur laut selat Ebeji ke dalam bentuk yang ditandai "Pond" di Peta sebagai Fig. 7.1 dari balasan Nigeria, yang terletak pada garis lintang 12°31'45" utara, dan garis bujur 14°13'00" timur (Data Adindan);
 - (c) Pokok interpretasi yang diajukan dalam Bab 7 dari balasan Nigeria, batas darat antara muara Ebeji dan titik dari Thalweg of Akpa Yafe adalah berhadapan dengan titik tengah dari muara sungai Archibong, adalah ditetapkan berdasarkan:
 - (i) *Para. 2-61* dari Deklarasi Thomson-Marchand, yang ditegaskan kembali dalam 'Exchange of Letter' tanggal 9 Januari 1931
 - (ii) *order* Nigeria (daerah perlindungan dan bangsa Kamerun) dalam Majelis tanggal 2 Agustus 1946 (Bagian 6 (1) dan Daftar kedua)
 - (iii) *Para. 13021* dari Persetujuan Batas Anglo-German tanggal 12 April 1913, dan
 - (iv) *Art. XV hingga XVII* dari perjanjian Anglo-German tanggal 11 Maret 1913, dan

- (d) Bahwa Interpretasi yang diajukan dalam bab 7 balasan Nigeria, dan kegiatan yang dilakukan di perbatasan tersebut, menandakan bahwa setiap wilayah dimana garis batas berdasarkan instrumen perbatasan tidak jelas dianggap jelas.
4. **Dalam hal batas maritim**, memutuskan dan menyatakan:
- (a) Bahwa ICJ tidak mempunyai yurisdiksi terhadap klaim maritim Kamerun dari titik dimana Kamerun mengklaim perairan berdasarkan klaim yang diajukan oleh Guinea Khatulistiwa kepada Kamerun, atau dengan kata lain klaim Kamerun tidak dapat diterima terhadap hal tersebut.
- (b) Bahwa klaim Kamerun terhadap batas maritim berdasarkan pembagian secara umum dari zona maritim di Gulf of Guinea tidak dapat diterima, dan bahwa para pihak mempunyai kewajiban menurut *art. 74⁶ dan 83⁷ UNCLOS*

⁶ Art. 74 UNCLOS, (1) The delimitation of the exclusive economic zone between States with opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution.

(2) If no agreement can be reached within a reasonable period of time, the States concerned shall resort to the procedures provided for in Part XV.

(3) Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned, in a spirit of understanding and co-operation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation.

(4) Where there is an agreement in force between the States concerned, questions relating to the delimitation of the exclusive economic zone shall be determined in accordance with the provisions of that agreement.

⁷ Art. 84 UNCLOS, Delimitation of the continental shelf between States with opposite or adjacent coasts

1. The delimitation of the continental shelf between States with opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution.

2. If no agreement can be reached within a reasonable period of time, the States concerned shall resort to the procedures provided for in Part XV.

3. Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned, in a spirit of understanding and co-operation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation.

4. Where there is an agreement in force between the States concerned, questions relating to the delimitation of the continental shelf shall be determined in accordance with the provisions of that agreement.

(*United Nations Conventions Law of The Sea*), untuk berunding dengan itikad baik untuk menyetujui perbatasan yang adil dari zona-zona maritime mereka, dimana garis batas yang demikian perlu memperhatikan hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber mineral dari *Continental Shelf* (dasar benua), diberikan kepada masing-masing pihak tanggal 29 Maret 1994 tanpa protes tertulis dari masing-masing pihak dan juga dengan memperhatikan klaim maritim dari negara ketiga.

- (c) Dengan kata lain, bahwa klaim Kamerun terhadap batas maritim berdasarkan pembagian secara umum dari zona maritim di Gulf of Guinea tidak berdasar dan harus ditolak
- (d) Bahwa, berdasarkan klaim Kamerun terhadap batas maritim mungkin dapat diterima pada *proceeding* awal, klaim Kamerun terhadap perbatasan maritim di barat dan selatan yang tumpah tindih seperti yang tertera pada *Fig. 10.2* dari balasan Nigeria, adalah ditolak.
- (e) Bahwa wilayah perairan kedua negara tersebut dipisahkan oleh garis tengah sampai the Rio del Rey
- (f) Bahwa, lebih jauh dari the Rio del Rey, masing-masing zona maritim para pihak dibatasi oleh garis yang ditarik sesuai dengan prinsip "*equidistance*" sampai pada titik dimana garis bertemu dengan garis tengah perbatasan dengan Guinea Khatulistiwa, contohnya kira-kira pada 4°6' utara, 8°30' timur;

5. **Atas klaim Kamerun mengenai pertanggungjawaban Negara**, memutuskan dan menyatakan:

Bahwa, berdasarkan klaim-klaim yang masih dipertahankan oleh Kamerun. Klaim-klaim tersebut tak berdasarkan fakta dan hukum, dan

6. **Atas counter-klaim Nigeria**, secara spesifik dalam bagian VI dari counter-memorial Nigeria dan dalam Bab 18 balasan Nigeria, memutuskan dan menyatakan:

Bahwa Kamerun bertanggung jawab terhadap Nigeria dalam setiap tuntutan, jumlah perbaikan, bila tidak disetujui oleh para pihak dalam waktu 6(enam) bulan dari tanggal putusan, maka ditentukan dengan putusan ICJ selanjutnya.

Guinea Khatulistiwa

Sesuai *art. 85 para. 3* Peraturan Peradilan, Guinea Khatulistiwa menyatakan, antara lain: "Kami meminta ICJ untuk tidak membatasi batas maritim antara Kamerun dan Nigeria di wilayah yang terletak dekat dengan Guinea Khatulistiwa garis pantai kedua belah pihak atau mengemukakan pendapat-pendapat yang dapat merugikan kepentingan kami dalam konteks negosiasi batas maritim kami dengan negara tetangga kami ... untuk menjaga kepentingan pihak ketiga dalam *proceeding* ini, berarti bahwa batas antara Nigeria dan Kamerun yang diputuskan oleh ICJ harus mempertimbangkan bagian utara dari garis tengah antara Pulau Bioko milik Guinea Khatulistiwa dan Benua Afrika."

Putusan (*Decision*)

I. (A) 14 v. 2

Menyatakan bahwa batas antara Republik Kamerun dan Republik Federal Nigeria di wilayah Lake Chad dibatasi oleh Deklarasi Thomson-Marchand 1929/1930, seperti juga yang terdapat dalam *Henderson-Fleuriau Exchange of Notes* 1931

(B) 14 v. 2

Menyatakan bahwa garis batas antara Republik Kamerun dan Republik Federal Nigeria di *Lake Chad* adalah sebagai berikut:

Dari tiga titik di *Lake Chad* yang terletak pada 14°04'59"9999 bujur timur dan 13°05' lintang utara, dalam garis lurus terhadap muara sungai Ebeji yang terletak pada 14°12'12" bujur timur dan 12°32'17" lintang utara dan kemudian dalam garis lurus menuju titik dimana sungai Ebeji terbagi dalam dua cabang, terletak pada 14°12'03" bujur timur dan 12°30'14" lintang utara.

II. (A) 15 v. 1

Memutuskan bahwa batas negara antara Republik Kamerun dan Republik Federal Nigeria adalah dibatasi dari Lake Chad hingga Teluk Bakassi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) Dari titik dimana sungai Ebeji terbagi dalam dua cabang sejauh puncak Tamnyar, berdasarkan *para. 2 sampai 60* dari Deklarasi Thomson-Marchand 1929-1930 seperti yang terdapat juga dalam *Henderson-Fleuriau Exchange Notes* 1931
- (ii) Dari puncak Tamnyar hingga pillar 64 sesuai *art. XII* dari Persetujuan Anglo-German 12 April 1913, oleh *order* British dalam majelis tanggal 2 Agustus 1946
- (iii) Dari pillar 64 hingga teluk Bakassi, oleh Persetujuan Anglo-German tanggal 11 Maret dan 12 April 1913

(B) Dengan suara bulat,

Memutuskan bahwa instrumen hukum yang telah disebutkan sebelumnya akan diinterpretasikan dalam cara yang telah ditentukan dalam *para.* 91, 96, 102, 114, 119, 124, 129, 134, 139, 146, 152, 155, 160, 168, 179, 184, dan 189 dari putusan ini.

III. (A) 13 v. 3

Memutuskan bahwa batas antara Republik Kamerun dan Federal Republik Nigeria di Bakassi dibatasi oleh *art XVIII sampai XX* dari persetujuan Anglo-German tanggal 11 Maret 1913

(B) 13 v. 3

Memutuskan bahwa kedaulatan atas teluk Bakassi terletak di Republik Kamerun

(C) 13 v. 3

Memutuskan bahwa batas Republik Kamerun dan Federal Republik Nigeria di Bakassi diikuti the *thalweg* dari sungai Akpakorum (Akwayafe), membagi kepulauan Mangrove dekat Ikang seperti yang tertera dalam peta TSHS 2240, sejauh garis lurus yang menggabungkan titik Bakassi dan titik King.

IV. (A) 13 v. 3

Menemukan, adanya delapan butir keberatan utama Nigeria terdahulu, yang dinyatakan dalam putusannya tanggal 11 Juni 1998 tidak memiliki karakter eksklusif⁸ utama dalam kasus, bahwa ICJ memiliki yurisdiksi atas klaim yang diajukan oleh Republik Kamerun mengenai batas wilayah maritim termasuk dalam Republik Kamerun dan Republik Federal Nigeria dan klaim-klaim tersebut dapat diterima.

(B) 13 v. 3

Memutuskan bahwa, hingga titik G ke bawah, batas wilayah maritim antara Republik Kamerun dengan Republik Federal Nigeria dinyatakan sebagai berikut:

- Mulai dari titik persimpangan garis tengah dari selat yang dapat dilayari di sungai Akwayafe dengan garis lurus yang menggabungkan titik Bakassi dan titik King seperti yang dinyatakan dalam point III (C) diatas, perbatasan diikuti dengan 'garis pemisah' yang ditarik secara bersamaan di Yaounde pada 4 April 1971 oleh Kepala Negara Kamerun dan Nigeria berdasarkan perjanjian British Admiralty 3433 (Deklarasi Yaounde II) dan melalui 12 titik, yang koordinatnya telah ditentukan dalam putusan ini.
- Dari titik 12, perbatasan dilanjutkan dengan garis yang ada dalam deklarasi yang ditandatangani oleh Kepala Negara Kamerun dan Nigeria di Maroua pada 1 Juni 1975 (Deklarasi Maroua), yang dikoreksi dengan '*Exchange of Letter*' antar Kepala Negara pada 12

⁸ Art. 36 Statuta ICJ

Juni dan 17 Juli 1975, bahwa garis yang melewati titik A ke G, yang koordinatnya ditentukan dalam putusan ini.

(C) Dengan suara bulat,

Memutuskan bahwa, dari titik G, garis perbatasan antara wilayah maritim yang masuk ke dalam Republik Kamerun dan Federal Republik Nigeria adalah berdasarkan titik tertinggi 270 derajat sejauh garis "*equidistance*" melalui titik tengah dari garis yang menghubungkan titik barat dan titik timur; garis batas tersebut kemudian bertemu dengan garis "*equidistance*" pada titik X, dengan koordinat 8°21'20" bujur timur dan 4°17'00" lintang utara.

(D) Dengan suara bulat,

Memutuskan bahwa dari titik X, perbatasan antara wilayah maritim yang termasuk dalam wilayah secara Republik Kamerun dan Federal Republik Nigeria berdasarkan titik tertinggi 187°52'27".

V. (A) 14 v. 2

Memutuskan bahwa Republik Federal Nigeria mempunyai kewajiban dan tanpa syarat untuk menarik kegiatan administrasi dan militernya dari wilayah kedaulatan Republik Kamerun sesuai butir I dan III dari paragraf yang berlaku ini.

(B) Dengan suara bulat,

Memutuskan bahwa Republik Kamerun mempunyai kewajiban dan tanpa syarat untuk menarik kegiatan administrasi dan militernya yang mungkin berada di wilayah kedaulatan Republik Federal Nigeria sesuai butir II dari paragraph yang berlaku ini. Republik Federal Nigeria mempunyai kewajiban yang sama dalam memperhatikan wilayah kedaulatan Republik Kamerun sesuai butir II dari paragraf yang berlaku ini.

(C) 15 v. 1

Memperhatikan, komitmen yang dilakukan oleh Republik Kamerun pada saat dengar pendapat (*hearings*) yaitu, "Kesetiaan terhadap kebijakan tradisional yaitu toleransi dan keramah-tamahan, akan berlanjut untuk melindungi kehidupan bangsa Nigeria di teluk Bakassi dan di wilayah *Lake Chad*."

(D) Dengan suara bulat

Menolak semua permohonan Republik Kamerun mengenai tanggung jawab negara dari Republik Federal Nigeria dan menolak counter-klaim Republik Federal Nigeria.

Pernyataan Hakim Oda (*Declaration of Judge Oda*)

Hakim Oda mendukung secara penuh kesimpulan yang telah diambil ICJ dalam permasalahan utama dari kasus yang ada, yaitu teluk Bakassi dan batas negara di Lake Chad dengan antara Lake Chad dan Laut, walaupun ia menyatakan beberapa reservasi dalam hal-hal teknis. Hakim Oda memegang teguh reservasi yang

mengacu pada putusan ICJ subparagraph IV, dalam masalah 'batas maritim, yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai masalah utama dalam kasus ini. Ia berbagi sedikit pandangan ICJ dan hanya memberikan pendapat pada point IV (B), (C), dan (D) karena penarikan garis yang ada tidak seluruhnya sesuai dan pada kenyataannya tidak menyebabkan kerugian apa pun. Ia menyatakan bahwa kesalahan prosedural dan substantif dibuat tidak hanya oleh pemohon (Kamerun) tapi juga oleh ICJ.

Dari segi prosedur, Hakim Oda memberikan fakta bahwa pada tahun 1994 permohonan Kamerun tidak dapat dilihat sebagai permintaan kepada ICJ untuk memutuskan 'perkara hukum' mengenai batas maritim sesuai dalam *art 36 (2)* dari statuta ICJ. Hanya diminta mengenai penarikan garis batas untuk masalah perbatasan. Pada putusan tahun 1998, ICJ menolak keberatan utama Nigeria yang terdahulu dan memutuskan bahwa suatu perkara dapat diajukan secara sepihak kepada ICJ oleh Kamerun. Pemohon, Kamerun, mengubah posisi di *proceeding* dengan memasukkan klaim maritimnya yang dinyatakan dalam bentuk peta koordinat. Kesalahan prosedural ini berpengaruh pada perubahan dasar dalam corak keseluruhan kasus. Dalam keterangan ini, Hakim Oda memberikan suara melawan point IV (A) dari bagian pelaksanaan putusan.

Dari segi substantif, Hakim Oda menggaris-bawahi kesalahan oleh ICJ dan pemohon untuk mengakui perbedaan dasar antara laut wilayah dan wilayah *continental shelf* (dasar benua), yang diatur oleh dua rejim hukum yang berbeda. Hakim Oda menyatakan bahwa dalam permasalahan tersebut dari batas dalam laut wilayah, perbedaan antara dua pihak adalah, dalam kenyataannya, permasalahan yang berhubungan semata-mata hanya mengenai status dari teluk Bakassi (walaupun batas antara Kamerun dan Nigeria terletak ke Barat atau ke Timur dari teluk Bakassi) dan tidak untuk batas laut. Setelah menyatakan Bakassi adalah bagian dari Kamerun, seharusnya tidak ada yang perlu ditambahkan dari putusan ICJ. Hal ini adalah ketidakmampuan ICJ untuk menyediakan dua table mengenai koordinat yang mengacu pada laut territorial.

Untuk bagian dari *Continental Shelf* (dasar benua), ICJ menyatakan putusan membentuk sebuah garis yang berbeda dari pandangan klaim garis para pihak. Kesalahan ICJ terhadap perbatasan maritim berasal dari ketidakmampuan untuk mengerti

hukum dari masalah ini. Menurut hakim Oda, tidak ada peraturan hukum atau prinsip hukum yang mengenal bahwa garis yang telah ada sebagai satu-satunya garis yang dapat diterima penerimaan dalam hukum internasional. Garis batas yang konkrit dari *continental shelf* (dasar benua) ditentukan berdasarkan negosiasi garis asalkan hal tersebut berdasarkan pada keadilan. Hakim Oda lebih lanjut menyatakan bahwa Konvensi Jenewa 1958 atas *Continental shelf* memberi pedoman bagi para pihak untuk bernegosiasi mereka seharusnya mencari "solusi yang pantas" dibawah yang disebut sebagai "Equatorial (*median line*) dan ketentuan keadaan mengenai khusus." Konvensi 1982 UNCLOS mencoba lebih jauh menjelaskan permasalahan tersebut dalam art. 83 (1)⁹ yang mengatur delimitasi dari *continental shelf* agar dapat dimasukkan dalam perjanjian dengan dasar hukum internasional... yang mengacu untuk mencapai solusi yang seimbang.

Dalam pandangan Hakim Oda, kesalahpahaman terbesar berlaku dalam lingkaran akademis mengenai interpretasi art. 83 (2)¹⁰ dari konvensi 1982. Pertama, ketentuan ini tidak menyatakan klausa persetujuan seperti yang dinyatakan dalam art. 36 (1)¹¹ dari statuta ICJ. Kedua, fakta bahwa negosiasi-negosiasi mengenai perbatasan telah gagal tidak dalam pengertian sendiri bahwa telah berkembang suatu "perkara (hukum)." Ketiga, art. 83(2) seharusnya tidak diinterpretasikan sebagai perundingan yurisdiksi yang wajib dalam lembaga seperti yang tertulis dalam art. 287, Part XV¹².

⁹ Art. 83 (1) UNCLOS "the delimitation of the continental shelf between states with opposite or adjacent coast shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in article 38 of the statute of the International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution."

¹⁰ Art. 83 (2) UNCLOS "If no agreement can be reached within a reasonable period of time, the States concerned shall resort to the procedures provided for in Part XV."

¹¹ Art. 36 (1) Statuta ICJ "The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially provided for in the Charter of the United Nations or in treaties and conventions in force."

¹² Article 287 UNCLOS

Choice of procedure

1. When signing, ratifying or acceding to this Convention or at any time thereafter, a State shall be free to choose, by means of a written declaration, one or more of the following means for the settlement of disputes concerning the interpretation or application of this Convention:
 - (a) the International Tribunal for the Law of the Sea established in accordance with Annex VI;
 - (b) the International Court of Justice;

Hakim Oda menyatakan bahwa ICJ dapat bertindak sebagai pihak ketiga apabila diminta secara bersamaan oleh para pihak untuk menarik garis batas tapi kasus ini dibawa secara sepihak oleh Kamerun dan bahkan para pihak belum memulai negosiasi. Dalam hal ini sebenarnya ICJ tidak dapat mengajukan prosedur yang menghasilkan putusan yang mengikat mengenai garis-garis spesifik (garis perbatasan) apapun. (Yasmine MS Soraya)

International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments^{*)}

IMO telah mengadopsi *International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments* dalam konferensi internasional yang diadakan pada 9-13 Februari 2004 di markas IMO di London.

-
- (c) an arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VII;
 - (d) a special arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VIII for one or more of the categories of disputes specified therein.
2. A declaration made under paragraph 1 shall not affect or be affected by the obligation of a State Party to accept the jurisdiction of the Sea-Bed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea to the extent and in the manner provided for in Part XI, section 5.
 3. A State Party, which is a party to a dispute not covered by a declaration in force, shall be deemed to have accepted arbitration in accordance with Annex VII.
 4. If the parties to a dispute have accepted the same procedure for the settlement of the dispute, it may be submitted only to that procedure, unless the parties otherwise agree.
 5. If the parties to a dispute have not accepted the same procedure for the settlement of the dispute, it may be submitted only to arbitration in accordance with Annex VII, unless the parties otherwise agree.
 6. A declaration made under paragraph 1 shall remain in force until three months after notice of revocation has been deposited with the Secretary-General of the United Nations.
 7. A new declaration, a notice of revocation or the expiry of a declaration does not in any way affect proceedings pending before a court or tribunal having jurisdiction under this article, unless the parties otherwise agree.
 8. Declarations and notices referred to in this article shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the States Parties.

^{*)} <http://www.imo.org/newsroom>

Latar Belakang

Air pemberat (*ballast water*) adalah air yang dibawa dalam kapal untuk menjaga stabilitas, keseimbangan, dan keutuhan struktur kapal. Hal ini analog dengan kantong pasir pada balon udara panas tradisional yang dibawa untuk menjaga agar balon tetap terbang rendah, dan melepaskannya jika menginginkan balon terbang tinggi. Selama ribuan tahun, kapal membawa pemberat solid seperti batu, pasir, atau logam. Dalam kapal modern, fungsi pemberat solid tersebut digantikan dengan air karena lebih efisien dan ekonomis dalam menjaga keseimbangan kapal ketika sedang tidak mengangkut muatan.

Ribuan spesies laut, yang berukuran kecil dan besar, bisa terbawa dalam air pemberat kapal. Selama ini, spesies laut tersebar di samudera karena kondisi alam seperti terbawa aliran air, menempel pada kayu atau puing yang mengapung. Temperatur dan kondisi tanah menjadi hambatan yang mengurangi persebaran spesies ke area tertentu. Hal ini akhirnya membentuk pola biogeografi alami, khususnya pembagian zona pan-global menjadi 2, yaitu zona perairan dingin beriklim sedang di belahan bumi bagian utara dan belahan bumi bagian selatan, dimana keduanya memiliki keanekaragaman hayati laut yang berbeda. Di daerah tropis tidak terdapat hambatan alami semacam itu sehingga keanekaragaman hayati laut cenderung homogen sepanjang Indo-Pasifik, dari pantai timur Afrika sampai pantai barat Amerika Selatan.

Perkembangan teknologi kapal telah meningkatkan pelayaran perdagangan internasional sekaligus mengurangi hambatan alamiah untuk penyebaran spesies. Kapal modern memungkinkan suhu yang sesuai bagi spesies laut untuk bisa menembus daerah tropis, atau spesies laut iklim utara memasuki laut iklim selatan, dan sebaliknya. Setiap tahun, sekitar 3-5 milyar ton air berpindah dan 7000 spesies terbawa dalam tanki air pemberat ke seluruh dunia. Spesies yang terbawa dan berhasil bertahan di lingkungan laut yang baru akan cenderung invasif dalam jumlah yang merusak, mengalahkan spesies lokal, sehingga merubah keseluruhan ekosistem. Berbeda dengan polusi laut lainnya seperti tumpahan minyak yang bisa dibersihkan dan laut berangsur-angsur bersih, dampak dari invasi spesies laut umumnya bersifat permanen.

Konsep

International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments mengatur mengenai pengambilan dan pelepasan air dan sedimen pemberat kapal agar tidak memindahkan spesies laut dari habitat aslinya ke lingkungan baru. Invasi spesies laut ke lingkungan baru melalui air pemberat kapal adalah salah satu dari 4 ancaman terbesar bagi lautan dunia. Ketiga ancaman lainnya adalah polusi laut yang bersumber dari daratan, over-eksploitasi atas sumber daya laut, dan perubahan/perusakan habitat laut.

Tujuan konvensi ini untuk mencegah dampak merusak dari penyebaran organisme akuatik berbahaya yang terbawa dalam air pemberat kapal (*ships' ballast water*). Dengan adanya konvensi ini, seluruh kapal harus mengimplementasikan *Ballast Water and Sediments Management Plan*, membawa *Ballast Water Record Book*, dan melaksanakan prosedur manajemen air pemberat sesuai standar yang ditetapkan. Konvensi ini menjadi ketentuan yang bersifat global dalam mengontrol dan mengatur air pemberat kapal sehingga bisa mencegah, meminimalisasi, dan akhirnya mengeliminasi perpindahan patogen dan organisme akuatik berbahaya yang melintasi lautan dan samudera di dunia.

Mekanisme Khusus

Untuk membantu negara berkembang dalam memahami permasalahan dan memantau situasi, IMO menyediakan bantuan dan keahlian teknis melalui *Global Ballast Water Management Programme (Globalballast)*, suatu *multi-million dollar project* yang didukung oleh GEF (*Global Environmental Facility*) dan UNDP.

Main Features

International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments terdiri atas *Articles* dan *Annex* yang memuat persyaratan dan standar teknis dalam regulasi konvensi. Berdasarkan *article 2 (General Obligations)*, peserta konvensi berkewajiban melaksanakan secara penuh semua ketentuan dalam konvensi dan *Annex* untuk mencegah, meminimalisasi, dan akhirnya mengeliminasi penyebaran patogen dan organisme akuatik berbahaya melalui kontrol dan manajemen air dan sedimen pemberat kapal. Para pihak diberikan hak untuk mengambil tindakan yang lebih tegas berkaitan dengan pencegahan, reduksi, dan eliminasi spesies akuatik berbahaya, baik secara

individual maupun bersama-sama peserta lainnya, selama konsisten dengan hukum internasional. Mereka harus menjamin bahwa kegiatan manajemen air pemberat tidak akan merusak lingkungan, kesehatan manusia, properti dan sumber daya negara lain.

Dalam hal fasilitas penerimaan sedimen (*Reception Facilities*), peserta harus menjamin bahwa pelabuhan dan terminal dimana pembersihan dan perbaikan tank pemberat dilakukan, memiliki fasilitas penerimaan yang memadai untuk menerima sedimen (*article 5*). Negara peserta wajib memajukan dan memfasilitasi penelitian teknis ilmiah mengenai pengaturan air pemberat, serta memantau dampak pengaturan (*Research and Monitoring*) tersebut di perairan yurisdiksinya (*article 6*). *Article 7* mengatur mengenai survey dan sertifikasi (*Survey and Certification*) yang diaplikasikan terhadap seluruh kapal. Menurut *Article 9*, setiap kapal yang tunduk pada konvensi dapat diinspeksi di pelabuhan atau terminal lepas pantai negara peserta lainnya oleh petugas yang berwenang (*Inspection of Ships*). Inspeksi dilakukan terhadap verifikasi sertifikat, buku rekam air pemberat, dan contoh air pemberat yang dibawa. Kapal yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak diizinkan untuk membuang air pemberat, kecuali terbukti air pemberatnya tidak mengancam lingkungan, kesehatan manusia, properti atau sumber daya.

Segala tindakan yang diambil sesuai konvensi ini terhadap suatu kapal tidak boleh menyebabkan penundaan pelayarannya / *Undue Delay* (*article 12*). Negara peserta wajib memberi bantuan pada peserta lainnya yang memerlukan bantuan teknis (*Technical Assistance*) untuk melatih personel; menjamin kesediaan teknologi, perlengkapan, dan fasilitas yang relevan; mengadakan program penelitian & pengembangan bersama; dan melaksanakan tindakan lain untuk mengimplementasikan konvensi secara efektif (*article 13*).

Annex dalam konvensi ini terdiri atas 5 bagian :

- *Section A (General Provisions)*: memuat definisi, aplikasi, dan pengecualian. Menurut Regulasi A-2, pertukaran air pemberat hanya bisa dilaksanakan melalui *Ballast Water Management*, sesuai ketentuan dalam *Annex* ini, kecuali ditentukan sebaliknya.
- *Section B (Management and Controls Requirements for Ships)*: menurut regulasi B-1, setiap kapal harus melaksanakan *Ballast Water Management Plan* yang telah disetujui oleh *Administration* (negara yang memberi izin operasi kapal). *Plan* ini spesifik bagi setiap kapal, meliputi deskripsi detail tindakan yang diambil untuk memenuhi keperluan dan praktek suplemental dari *Ballast Water Management*.

Regulasi B-2 mengatur bahwa tiap kapal harus memiliki *Ballast Water Record Book* untuk merekam segala aktivitas yang berkaitan dengan pengambilan dan pelepasan air pemberat. Regulasi B-3 mengatur kebutuhan spesifik untuk pengaturan air pemberat bagi kapal yang dibuat sebelum dan sesudah 2009, antara 2009 dan 2012, dan sesudah 2012, dengan kisaran kapasitas air pemberat antara 1500 dan 5000 m³. Metode pengaturan air pemberat lain bisa diterima sebagai alternatif asalkan menjamin level perlindungan yang sama terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan properti atau sumber daya, dan disetujui oleh MEPC (*Marine Environment Protection Committee*). Menurut Regulasi B-4, pertukaran air pemberat dilakukan sekurang-kurangnya 200 mil laut dari pulau terdekat dan di perairan dengan kedalaman 200 meter, atau sejauh mungkin dari pulau terdekat, dan setidaknya 50 mil laut dari pulau terdekat dan di perairan dengan kedalaman 200 meter. Jika hal tersebut tidak bisa dipenuhi, maka suatu area tertentu bisa ditunjuk dimana kapal bisa melepas air pemberat.

- Section C (*Additional Measures*): peserta bisa mengambil tindakan tambahan untuk tujuan konvensi. Hal ini bisa dilakukan secara individual maupun bersama-sama peserta lain, mengkonsultasikannya dengan negara terdekat yang mungkin terpengaruh dengan standar ini, dan memberitahukannya pada IMO setidaknya 6 bulan sebelum proyek itu dilaksanakan.
- Section D (*Standards for Ballast Water Management*) terdiri atas:
 - Regulasi D-1: *Ballast Water Exchange Standard*. Pertukaran air pemberat dilakukan dengan efisiensi 95% volumetrik pertukarannya.
 - Regulasi D-2: *Ballast Water Performance Standard*. Kapal harus melepas kurang dari 10 organisme yang dapat hidup (*viable*) per meter kubik yang ukurannya sama dengan atau lebih dari 50 mikrometer dalam dimensi minimum, dan kurang dari 10 organisme *viable* per milimeter yang ukurannya kurang dari 50 mikrometer dalam dimensi minimum dan sama dengan atau lebih dari 10 mikrometer dalam dimensi minimum; dan pelepasan mikroba indikator tidak boleh melebihi konsentrasi yang telah ditentukan dalam *Annex* ini.
 - Menurut Regulasi D-3, sistem *Ballast Water Management* harus disetujui oleh *Administration* dan sesuai dengan *IMO Guidelines*. Ketentuan ini meliputi sistem yang menggunakan kimia atau biosid; organisme atau mekanisme biologis; atau sistem yang mengganti karakteristik kimia atau fisik dari air pemberat.
 - Regulasi D-4 mengatur *Prototype Ballast Water Treatment Technologies* yang memungkinkan kapal untuk melakukan tes dan evaluasi atas teknologi tersebut selama 5 tahun sebelum menyetujui kebutuhan air pemberat ini.

- Sedangkan regulasi D-5 mengatur tentang review standar oleh IMO, dengan memberikan pertimbangan keamanan, penerimaan lingkungan, kepraktisan, dan efektivitas biaya & biologis.
- Section E (*Survey and Certification Requirements for Ballast Water Management*): mengatur keperluan untuk pembaruan awal, tiap tahun, survey dan sertifikasi pembaruan dan intermediate.

Selain *Annex*, konvensi ini juga melampirkan *Appendices* mengenai format *International Ballast Water Management Certificate*, dan format *Ballast Water record Book*.

Entry into Force

Konvensi ini berlaku 12 bulan setelah diratifikasi oleh 30 negara yang mewakili 35% muatan (*tonnage*) kapal dagang dunia (*article 18*).

Related Regulations

Dalam kaitannya dengan konvensi ini, konferensi mengadopsi 4 resolusi:

- Conference Resolution 1: *Future work by the organization pertaining to the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments.*
- Conference Resolution 2: *The use of decision making tools when reviewing the standards pursuant to Regulation D-5.*
- Conference Resolution 3: *Promotion of technical co-operation and assistance.*
- Conference Resolution 4: *Review of the Annex to the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments.*

General Principles

Menilik tujuan *Convention on Biological Diversity (CBD)* 1992, penyebaran patogen dan organisme akuatik berbahaya melalui air pemberat kapal menjadi ancaman bagi konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan (*conservation and sustainable use*) dari keanekaragaman hayati. Hal ini juga sejalan dengan keputusan *Conference of the Parties (COP)* 1998 mengenai konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan dari ekosistem laut dan pantai, dan *COP* 2002 tentang spesies asing yang mengancam ekosistem, habitat dan spesies, termasuk *guiding principles* mengenai spesies invasif. (Asih Saraswati)

Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea^{*)}

Statuta pembentukan Mahkamah Hukum Laut Internasional

International Tribunal for the Law of the Sea (Mahkamah Hukum Laut Internasional), yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan Tribunal, adalah badan yang dibentuk berdasarkan Annex VI dari konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982). UNCLOS 1982 mengamanatkan agar setiap perselisihan atau sengketa yang timbul diantara negara peserta konvensi diselesaikan melalui jalan damai. Prinsip ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 279 UNCLOS 1982. Pasal tersebut menyatakan:

"State parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this convention by peaceful means..."

Kata "shall" dalam pasal tersebut merupakan penegasan bahwa setiap sengketa yang muncul "harus" diselesaikan dengan cara-cara yang damai.

Pada pasal selanjutnya yaitu pasal 280, para pihak yang bersengketa dengan persetujuan bersama dapat memilih sendiri prosedur apa yang akan digunakan untuk penyelesaian sengketa yang timbul. Beberapa pilihan prosedur yang dapat dipilih menurut pasal 287 UNCLOS 1982, upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui:

1. *International Tribunal for the Law of the Sea* (Mahkamah Hukum Laut Internasional) yang dibentuk berdasarkan annex VI.
2. *International Court of Justice* (ICJ)
3. *Arbitral Tribunal* (Mahkamah Arbitrase) yang dibentuk berdasarkan Annex VII, dan;
4. *Special Arbitral Tribunal* (Mahkamah Arbitrase Khusus) yang dibentuk berdasarkan Annex VIII guna menyelesaikan masalah-masalah yang khusus.

Dalam menjalankan tugasnya, karena dibentuk berdasarkan UNCLOS 1982, maka Tribunal juga harus menjadikan UNCLOS 1982 sebagai pedoman. Hal ini dinyatakan dalam pasal 1 dari Statuta. Selain itu, dalam pasal 1 juga dinyatakan bahwa Tribunal berkedudukan di Hansceatic City, Hamburg, dalam wilayah Republik Federal Jerman. Walaupun berkedudukan di Jerman,

^{*)} <http://www.itlos.org>

namun dalam menjalankan tugasnya Tribunal dapat mengambil tempat dimanapun jika memang ada kebutuhan yang menghendakinya.

Kompetensi dan Yurisdiksi Tribunal

Ketentuan mengenai Kompetensi dan Yurisdiksi dari Tribunal terdapat pada bagian kedua dari Statuta. Pasal 20 statuta menyatakan bahwa Tribunal terbuka bagi semua negara peserta konvensi, ini berarti bahwa setiap negara anggota konvensi dapat mengajukan permasalahannya ke hadapan Tribunal. Jika diartikan sebaliknya, Tribunal memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul diantara negara-negara peserta konvensi. Selain negara peserta konvensi UNCLOS 1982, pasal 20 Statuta juga menyatakan bahwa negara-negara yang bukan merupakan anggota dari UNCLOS 1982, juga dapat mengajukan sengketa yang timbul kepada Tribunal jika dikehendaki oleh para pihak atau negara-negara yang bersengketa tersebut sepanjang sengketa yang timbul berkaitan dengan hal-hal yang terdapat pada bagian XI dari UNCLOS 1982.

Yurisdiksi yang dimiliki oleh Tribunal mencakup berbagai sengketa dan permasalahan-permasalahan yang diajukan kehadapannya sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi. Hal ini dinyatakan dalam pasal 21 Statuta. Jika kita melihat pada ketentuan pasal 279 UNCLOS 1982, terdapat kata-kata "*...concerning the interpretation or application of this convention...*". Dari pernyataan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya permasalahan yang dapat ditangani oleh Tribunal adalah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan interpretasi atau penafsiran dan penerapan dari pasal-pasal yang pada UNCLOS 1982. Selanjutnya pasal 23 dari statuta menyatakan bahwa dalam mengambil putusan berkaitan dengan sengketa yang ditanganinya, Tribunal harus mengacu pada ketentuan yang terdapat didalam pasal 293 dari UNCLOS 1982. Ketentuan dalam pasal 293 UNCLOS menyatakan bahwa Tribunal harus menggunakan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam UNCLOS dan ketentuan hukum internasional lain yang tidak bertentangan dengan UNCLOS sebagai dasar dari dibuatnya putusan.

Keorganisasian dari Tribunal

Ketentuan mengenai struktur organisasi, kedudukan dan keanggotaan dari Tribunal tercantum dalam bagian pertama pasal 2

hingga pasal 19 Statuta. Tribunal terdiri dari 21 orang anggota yang dipilih oleh negara-negara anggota konvensi UNCLOS 1982. Jumlah anggota yang terdiri dari 21 orang dianggap cukup untuk mewakili berbagai prinsip dan sistem hukum yang ada di dunia. Orang-orang yang dapat duduk dalam Tribunal haruslah orang-orang yang memiliki reputasi tinggi dalam bidang keadilan, memiliki integritas yang tinggi dan diakui kompetensinya dalam bidang hukum terutama hukum laut. Dari 21 orang anggota Tribunal, tidak boleh ada dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang sama.

Setiap negara anggota UNCLOS berhak mengajukan dua orang sebagai calon untuk duduk dalam Tribunal. Nama dari calon-calon tersebut kemudian diserahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB yang kemudian dibuat daftar nama calon berdasarkan urutan abjad. Anggota Tribunal harus dipilih dari orang-orang yang berada didalam daftar nama calon tersebut. Pemilihan dilaksanakan pada pertemuan dari negara-negara peserta konvensi yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal PBB. Tatacara pemilihan adalah menggunakan pemungutan suara dengan sistem tertutup. Sesi pemilihan harus memenuhi quorum yaitu dihadiri oleh lebih dari dua per tiga anggota konvensi.

Anggota dari Tribunal dipilih untuk masa jabatan selama 9 tahun dan memungkinkan untuk dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan lagi. Presiden dan wakil presiden dari Tribunal dipilih dari anggota Tribunal. Presiden dan wakil presiden tersebut dipilih untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat dipilih kembali. Setiap anggota dari Tribunal tidak boleh memiliki fungsi politik atau administratif lain diluar fungsinya sebagai anggota Tribunal. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keadilan dan ketidakberpihakan, anggota dari Tribunal tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai konsultan, penasihat atau mewakili pihak-pihak dari sengketa yang sedang ditangani oleh Tribunal. (Daeng Randy)

Sengketa Berkaitan dengan Kegiatan Reklamasi Di Sekitar Selat Johor (Malaysia Melawan Singapura)^{*)}

**Pengajuan Permohonan Putusan Sela Oleh Malaysia Kepada
International Tribunal For The Law Of The Sea.**

^{*)} http://www.itlos.org/start2_en.html

Pihak yang Bersengketa

Para pihak yang terlibat dalam sengketa ini adalah Malaysia dan Singapura.

Hal yang Dipersengketakan

Sengketa yang terjadi berkaitan dengan kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura yang mempengaruhi hak-hak Malaysia di sekitar Selat Johor yang menjadi pemisah antara Malaysia dan Singapura.

Pihak Malaysia mengajukan permohonan "Provisional Measures" (Putusan Sela) kepada Tribunal berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Arbitrase yang dibentuk berdasarkan Annex VII UNCLOS 1982. Dalam permohonan yang diajukan, Malaysia mengatakan bahwa tindakan yang kegiatan reklamasi yang dilakukan Singapura disekitar Pulau Tekong dan Tuas di wilayah Selat Johor, telah mengakibatkan kerusakan yang sangat serius terhadap lingkungan laut dan mengganggu kedaulatan dan hak dari Malaysia. Malaysia beranggapan bahwa kegiatan reklamasi yang dilakukan tersebut telah mengakibatkan perubahan pada sedimen bawah air dan mengakibatkan erosi pantai.

Berdasarkan pasal 290 UNCLOS, Tribunal, berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Arbitrase, dapat mengeluarkan putusan sela atas suatu sengketa bila putusan sela tersebut memang dirasa penting guna melindungi hak-hak dari pihak yang bersengketa atau mencegah terjadinya kerusakan yang lebih jauh terhadap lingkungan laut.

Permohonan para pihak

Dalam permohonan putusan selanya, Malaysia meminta kepada Tribunal untuk membuat putusan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Singapura diharuskan menunda semua kegiatan reklamasi yang dilakukan di wilayah perairan perbatasan antara kedua negara terutama di wilayah yang diklaim oleh Malaysia sebagai wilayah perairannya (disekitar Pulau Tekong dan Tuas).
2. Menyediakan Informasi yang dibutuhkan oleh Malaysia berkaitan dengan kegiatan reklamasi yang dilakukan. Informasi yang diminta mencakup tujuan dari kegiatan

reklamasi, metode atau cara-cara yang digunakan dalam melakukan kegiatan reklamasi, dan upaya perlindungan terhadap wilayah perairan terhadap kerusakan yang mungkin timbul (bila ada).

3. Memberi kesempatan kepada Malaysia untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan reklamasi tersebut berkaitan dengan informasi yang diberikan oleh Singapura.
4. Memerintahkan kepada Singapura untuk mengadakan perundingan lebih lanjut dengan Malaysia berkaitan dengan masalah-masalah yang belum terselesaikan.

Menanggapi permohonan yang dibuat oleh Malaysia, Singapura mengajukan permohonan kepada Tribunal untuk :

1. Menolak permohonan Malaysia atas dikeluarkannya Putusan Sela oleh Tribunal.
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang ditimbulkan atas permohonan Malaysia tersebut kepada Malaysia.

Fakta-fakta

Dalam proses pemeriksaannya, hal-hal yang dikemukakan dihadapan Tribunal adalah:

1. Berkaitan dengan kegiatan reklamasi yang dilakukan di wilayah Pulau Tuas, Tribunal berpendapat bahwa tidak terdapat suatu urgensi atau kepentingan yang mendesak sebagaimana yang diajukan oleh Malaysia berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerusakan yang parah terhadap lingkungan laut di wilayah perairan tersebut. Karenanya Tribunal berpendapat bahwa tidak diperlukan suatu putusan sela berkaitan dengan proses pemeriksaan dalam Mahkamah Arbitrase berkaitan dengan kegiatan reklamasi yang dilakukan Singapura.
2. Bahwa Singapura pernah membuat pernyataan yang menyatakan kesediaan pihaknya untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh Malaysia berkaitan dengan kegiatan reklamasi yang dilakukan. Singapura juga menyatakan pada dasarnya pihaknya bersedia untuk menerima kritik dan komentar dari Malaysia terhadap berbagai aspek dari kegiatan reklamasi dan dampak yang mungkin ditimbulkannya dan bersedia menegosiasikan hal tersebut dengan Malaysia. Namun menurut Singapura, Malaysia telah lalai untuk menanggapi tawaran yang diberikan tersebut.
3. Berkaitan dengan kegiatan reklamasi disekitar Pulau Tekong, Tribunal berpendapat bahwa sudah ada komitmen dari Singapura untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan atas kerusakan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kegiatan reklamasi.

4. Tribunal berpendapat bahwa kegiatan reklamasi memang dapat mengakibatkan berbagai dampak terhadap lingkungan dan kehidupan di laut. Untuk itu Tribunal merasa perlu dilakukan suatu kerjasama antara Malaysia dan Singapura dalam pertukaran informasi berkaitan dengan kegiatan reklamasi dan bekerja sama melakukan tindakan-tindakan guna mencegah timbulnya kerusakan akibat dari kegiatan reklamasi.

Putusan dari Tribunal

Berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, para anggota dari tribunal secara mutlak telah bersepakat untuk membuat suatu putusan sela berkaitan dengan pemeriksaan dalam Mahkamah Arbitrase sebagai berikut :

1. Memerintahkan Malaysia dan Singapura untuk bekerjasama dalam hal:
 - 1.1. Membentuk sebuah kelompok kerja independen yang terdiri dari para tenaga ahli yang bertugas untuk :
 - 1.1.1. Melakukan sebuah kegiatan studi dan penelitian dalam format yang disepakati oleh kedua belah pihak, guna memberikan data secara konkret mengenai berbagai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura beserta tindakan-tindakan yang diharuskan sebagai upaya perlindungan atau pencegahan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan laut.
 - 1.1.2. Menyiapkan dengan sesegera mungkin laporan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan disekitar wilayah Pulau Tekong.
 - 1.2. Mengadakan tukar menukar informasi berkaitan dengan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura.
 - 1.3. Melaksanakan putusan ini dengan sungguh-sungguh dan menghindari berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan maksud dari putusan ini.
2. Memerintahkan kepada Singapura untuk tidak melakukan Kegiatan reklamasi dengan cara-cara yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan laut dan mengakibatkan kerugian bagi Malaysia. Singapura juga berkewajiban untuk memberikan laporan dari setiap kegiatannya kepada kelompok kerja independen yang sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya.
3. Memerintahkan kepada Malaysia dan Singapura untuk memberikan laporan kepada Tribunal dan kepada Mahkamah Arbitrase selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 2004.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk menanggung secara sendiri-sendiri biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

(Daeng Randy)

International Convention on Salvage, 1989^{*)} (As amended by the Brice Protocol)

Latar Belakang

Untuk para penyelamat profesional di laut, prinsip '*no cure, no pay*' adalah salah satu peraturan yang dapat dibilang adil yang diadopsi oleh mahkamah pelayaran. Karena berdasarkan prinsip ini, penyelamat yang ahli dan profesional tidak akan menerima imbalan bila usaha penyelamatan yang dilakukannya gagal, atau jika hal-hal yang diselamatkan nilainya sangat kecil atau bahkan tidak bernilai sama sekali. Prinsip ini erat kaitannya dengan aturan lainnya yang menyatakan bahwa jumlah imbalan penyelamatan tidak dapat melebihi nilai barang yang diselamatkan itu sendiri. Prinsip tradisional semacam ini hanya akan mengabaikan keuntungan yang diberikan oleh para pemilik kapal kepada para penyelamat yang usahanya mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban yang besar si pemilik (terutama pertanggungjawaban kepada lingkungan dan pihak ketiga), walaupun para penyelamat tersebut tidak berhasil menyelamatkan apapun.

Di tahun-tahun ini, dengan diadopsinya peraturan mengenai perlindungan polusi, dan dengan semakin meningkatnya kepentingan publik atas perlindungan terhadap lingkungan, prinsip penyelamatan tradisional ini semakin menjadi terasa tidak adil. Karena dapat saja, para penyelamat profesional tersebut, terjerat dalam pertanggungjawaban yang besar yang dikenakan peraturan-peraturan mengenai perlindungan polusi lingkungan (terutama lingkungan laut). Berdasarkan hukum penyelamatan yang tradisional, penyelamat yang mencegah bencana lingkungan dengan cara menyelamatkan kapal yang masih dalam keadaan terbakar penuh, bila pada akhirnya hanya akan menemukan ada kerugian yang ditimbulkannya, tidak akan menerima imbalan atas usaha-usaha yang dilakukannya. Walaupun beberapa pengadilan telah mencoba memperbaiki ketidakadilan ini dengan mengakui secara hukum mengenai konsep '*liability salvage*' (yaitu imbalan penyelamatan pada para penyelamat untuk keberhasilan mencegah pemilik kapal bertanggungjawab terhadap klaim atas polusi yang ditimbulkan dan klaim lainnya), usaha ini tidak diterima secara luas.

^{*)} http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=259&doc_id=687

Konsep Salvage Convention 1989

Konsep utama Konvensi ini adalah mengenai Penyelamatan di Laut, yang melindungi para penyelamat dari ketidakadilan penerapan peraturan mengenai kelautan yang dapat menyebabkan penurunan profesionalitas para penyelamat di laut.

Materi-materi Pokok

Seperti konvensi-konvensi yang lain, dalam ketentuan pertama konvensi ini ditentukan mengenai batasan-batasan istilah yang akan digunakan. Penyelamatan yang dimaksud dalam Konvensi ini adalah, "Segala aktivitas atau tindakan yang diambil untuk membantu kapal atau kepemilikan lainnya yang sedang dalam keadaan bahaya di wilayah pelayaran atau perairan lainnya".

Ditentukan juga apa yang tidak dapat dikenakan melalui konvensi ini yaitu:

- Anjungan tetap maupun terapung, dan unit pengeboran lepas pantai yang berhubungan dengan pemanfaatan atau produksi sumber daya mineral dasar laut (*article 3*).
- kapal-kapal non-perdagangan yang dikelola pihak pemerintah suatu negara atau kapal perang (*article 4*).
- Peraturan-peraturan nasional yang berhubungan dengan operasi penyelamatan yang dikelola pihak pemerintah (namun dengan pengecualian, yaitu diberikannya hak pada si penyelamat untuk mengambil keuntungan melalui hak-hak dan perbaikan-perbaikan (*remedies*) yang tertera dalam konvensi ini).

Sedangkan mengenai kewajiban-kewajiban pihak penyelamat yang tertera dalam konvensi ini diatur dalam *article 8* antara lain:

- Melakukan operasi penyelamatan dengan sebaik-baiknya
- Dalam hal melakukan penyelamatan seperti yang tertera di atas, harus dilakukan agar dapat mencegah sebaik-baiknya atau setidaknya mengurangi kerusakan terhadap lingkungan
- Untuk menerima campur tangan penyelamat lain yang beralasan dan diminta oleh pemilik kapal atau nahkoda kapal atau lainnya yang sedang dalam keadaan bahaya (dengan syarat hal tersebut tidak mengurangi imbalan yang seharusnya diterima dan juga bila dilakukan dengan alasan yang kuat)

Bukan hanya penyelamat saja yang memiliki kewajiban, pihak pemilik kapal dan pihak nahkoda kapal juga memiliki kewajiban, diantaranya:

- Untuk bekerjasama dalam melakukan penyelamatan
- Mencegah atau setidaknya mengurangi kerusakan yang terjadi terhadap lingkungan seketika dalam operasi penyelamatan
- Secara khusus nahkoda memiliki kewajiban memberikan bantuan pada kapalnya dan personilnya yang dalam keadaan bahaya atau terancam kehilangan nyawa di laut. Untuk ini negara peseta harus mengadopsi peraturan mengenai masalah tersebut agar dapat ditegakkan dan dilaksanakan. Namun, pemilik kapal tidak dapat meminta pertanggungjawaban terhadap pelanggaran dari hal ini kepada nahkoda kapalnya. (*article 10*)

Dalam hal penyelamatan di laut ini, negara pantai tidak dilarang untuk melakukan operasi penyelamatan atau memberikan petunjuk-petunjuk saat dilakukannya operasi penyelamatan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di daerah laut negara pantai tersebut (misalnya untuk mencegah terjadinya polusi atau kerusakan lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan negara pantai tersebut). Hal ini tertera pada *article 9* dari konvensi.

Sedangkan hak-hak yang dimiliki pihak penyelamat yaitu penghargaan berupa imbalan bagi operasi penyelamatan yang memiliki hasil yang berguna (namun hanya bila operasi penyelamatan yang dilakukan berguna saja). (*article 12*)

Kriteria penentuan imbalan yang diberikan untuk para penyelamat dikemukakan pada *article 13* yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal seperti:

- o Nilai kapal atau barang-barang lain yang diselamatkan
- o Kemampuan dan usaha-usaha yang dilakukan penyelamat dalam mencegah atau mengurangi kerusakan pada lingkungan
- o Ukuran keberhasilan yang dicapai penyelamat
- o Sifat dan derajat keadaan bahayanya
- o Kemampuan dan usaha-usaha yang dilakukan penyelamat dalam menyelamatkan kapal, nyawa, dan barang-barang lainnya
- o Waktu yang digunakan dan pengeluaran serta kerugian yang disebabkan oleh penyelamat
- o Resiko pertanggungjawaban dan resiko lainnya yang dikelola penyelamat dan peralatan yang digunakan dalam operasi penyelamatan
- o Mendesaknya pelayanan yang dibutuhkan

- Ketersediaan kapal dan peralatan lainnya yang digunakan untuk operasi penyelamatan
- Kesiapan dan efisiensi peralatan milik penyelamat dan nilai peralatan tersebut

Prinsip yang utama adalah imbalan yang diberikan tidak melebihi dari nilai barang atau kapal yang diselamatkan.

Bila penyelamatan yang dilakukannya ternyata gagal, maka terdapat ketentuan mengenai kompensasi khusus yang diberikan oleh pemilik kapal yang sebanding dengan pengeluaran yang digambarkan oleh pihak penyelamat, dimana dapat meningkat hingga 30%, namun dengan pertimbangan-pertimbangan yang diutarakan di atas (mengenai penentuan besarnya imbalan), maka kompensasi khusus ini dapat meningkat namun tidak lebih dari 100% dari pengeluaran pihak penyelamat (*article 14*). Namun, operasi penyelamatan yang dilarang oleh pemilik kapal atau nahkoda, tidak berhak menerima pembayaran seperti yang tercantum dalam konvensi ini.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, jelaslah bahwa dengan dibentuknya konvensi ini akhirnya terpenuhi kebutuhan akan pengaturan secara internasional mengenai tindakan penyelamatan, yang terutama dikarenakan terjadinya peningkatan kekhawatiran mengenai perlindungan lingkungan. Dapat dikatakan juga bahwa tujuan lain pembentukan konvensi ini yaitu agar konvensi ini dapat memberikan kontribusi terhadap tindakan penyelamatan yang tepat dan efisien, sehingga dapat menjamin keamanan kapal-kapal dan kepemilikan lainnya yang berada dalam kondisi membahayakan, dan juga untuk melindungi lingkungan. (Fatiah Falhum)